|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspek | Indonesia (Jakarta ke IKN) | Australia (Melbourne ke Canberra) |
| Sistem Pemerintahan | Negara kesatuan dengan desentralisasi asimetris | Negara federal dengan pembagian kekuasaan pusat dan negara bagian |
| Alasan Pemindahan | Beban Jakarta terlalu tinggi, pemerataan pembangunan, simbol nasional baru | Kompromi politik antara Sydney dan Melbourne, lokasi netral dan terencana |
| Model Pemerintahan di Ibu Kota Baru | Otorita IKN (khusus, tidak ada DPRD, di bawah Presiden langsung) | Pemerintah ACT (Australian Capital Territory) dengan self-government |
| Tahapan Pemindahan | Bertahap hingga 2045, dimulai dari pemindahan lembaga pemerintahan | Bertahap sejak 1913, resmi 1927, lembaga federal pindah secara progresif |
| Fungsi Jakarta / Melbourne Saat Ini | Jakarta tetap sebagai pusat ekonomi dan kota global dengan kekhususan (UU DKJ) | Melbourne tetap sebagai pusat ekonomi dan markas lembaga federal non-pemerintahan |
| Kelembagaan Lokal | Tidak ada DPRD di IKN, regulasi dipusatkan pada Otorita | ACT memiliki parlemen lokal dan otoritas pembangunan (NCA) |
| Layanan Publik | Fokus digitalisasi dan efisiensi di IKN; layanan ekonomi tetap di Jakarta | Pemerintah federal di Canberra, layanan negara bagian tetap di Melbourne |
| Sistem Perencanaan Wilayah | Terpusat, diatur melalui OIKN tanpa keterlibatan legislatif daerah | Berbasis rencana tata kota federal dan ACT dengan pengawasan NCA |
| Ciri Khusus Ibu Kota Baru | Smart city, kota berkelanjutan, simbol masa depan Indonesia | Garden city, tata ruang lanskap alami, simbol netralitas nasional |

Tabel 1.2 Tabel Perbandingan Indonesia dan Australia